

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperbesar keuntungan dengan harapan pengenaan tarif pajak kecil. Praktik penghindaran pajak diduga dilakukan oleh direksi utama, terutama memiliki jabatan lebih lama dan pengalaman yang cukup lama (Jiang dkk., 2013). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekuasaan direksi utama dan kepemilikan institusional berdampak pada praktik penghindaran pajak perusahaan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa kekuasaan direksi utama memiliki pengaruh yang kuat terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini, perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 yang digunakan untuk sampel penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa kriteria sampel. Indikator sampel ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang bergerak di sektor <i>consumer non cyclical</i> dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023	125
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama periode tahun 2021-2023	(35)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2021-2023.	(29)
4	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional pada tahun 2021-2023.	(10)
5	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah.	(2)
6	Perusahaan <i>consumer non cyclical</i> yang berumur kurang dari 10 tahun.	(15)
7	Total perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian	34
8	Total tahun penelitian	3
9	Total sampel penelitian	102

Berdasarkan tabel diatas, terkait kriteria pemilihan sampel terdapat 125 perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 yang digunakan untuk sampel penelitian ini. Menurut hasil pemilihan sampel pada tabel 4.1 terdapat 35 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan pada periode 2021-2023. Selanjutnya ada 29 perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2021-2023, sehingga tidak termasuk pada kriteria sampel pada penelitian ini. Selanjutnya ada 2 perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah. Ada sekitar 15 perusahaan yang berumur kurang dari 10 tahun, sehingga tidak menjadi bagian dari sampel penelitian ini.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Direksi Utama	102	0,00	1,00	0,5686	0,49771
Kepemilikan Institusional	102	7,00	92,00	66,558 8	21,72263
Penghindaran Pajak	102	1,00	364,00	28,176 5	36,01963
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Hasil analisis deskriptif dengan SPSS menunjukkan statistik ringkasan untuk tiga variabel: Direksi Utama, Kepemilikan Institusional, dan Penghindaran Pajak, berdasarkan 102 sampel data. Direksi utama memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 1, dengan rata-rata 0.57, serta standar deviasi 0.50. Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai minimum 7, nilai maksimum 92, dengan rata-rata 66.56, serta standar deviasi 21.72. Penghindaran Pajak memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 364, dengan rata-rata 28.18, serta standar deviasi 36.02. Nilai standar deviasi yang besar menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi pada ketiga variabel ini dalam sampel yang dianalisis.

4.2.2 Uji Normalitas Data

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,21047631
Most Extreme Differences	Absolute	0,083
	Positive	0,083
	Negative	-0,043
Test Statistic		0,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115 ^c

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa residual yang distandarisasi berdistribusi normal. Nilai signifikansi menghasilkan 0,115 telah memenuhi asumsi normalitas karena nilai tersebut melebihi standar berdistribusi normal ($0,115 > 0,05$).

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Direksi Utama	0,998	1,002
	Kepemilikan Institusional	0,998	1,002

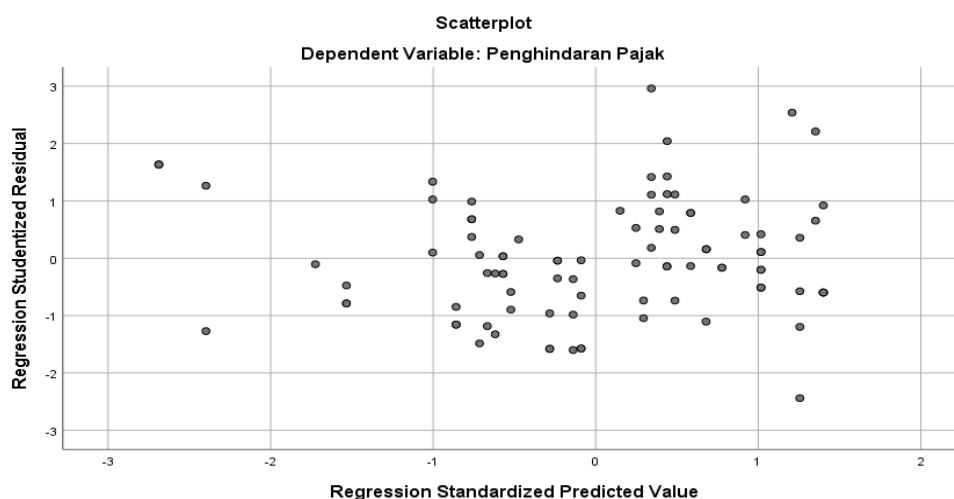
Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance*

sebesar 0,99 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,002 untuk kedua variabel independen, yaitu direksi utama dan Kepemilikan Institusional. Nilai *tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel independen.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Scatterplot



Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Gambar *scatterplot* digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada semua nilai prediktor. Dalam scatterplot tersebut, sumbu X menunjukkan *Regression Standardized Predicted Value* (nilai prediksi yang telah distandarkan), sedangkan sumbu Y menunjukkan *Regression Studentized Residual* (residual yang telah distandarkan). Jika titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu (seperti pola mengerucut atau menyebar melebar), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model memenuhi asumsi homoskedastisitas. Berdasarkan pola pada grafik ini, titik-

titik tampak tersebar cukup merata dan acak di sekitar garis horizontal nol tanpa pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan untuk menganalisis penghindaran pajak.

4.2.5 Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.310 ^a	0,096	0,076	2,253

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas hasil Uji Autokorelasi berdasarkan nilai *Durbin-Watson* adalah 2,253, dengan jumlah sampel 102 sehingga pada tabel *Durbin-Watson* nantinya diperoleh nilai yakni:

Tabel 4.6 Uji *Durbin-Watson*

Sampel	dL	Du	D
102	1.6376	1.7175	2.253

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Data tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan nilai 4-Du didapatkan sebesar 2.2825. Dengan demikian dianalisis jika d melebihi du serta dibawah 4-du, maka asumsi ketiadaan autokorelasi terpenuhi, sehingga model regresi dapat digunakan.

4.1.6 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.310 ^a	0,096	0,076

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas hasil Uji Determinasi menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0.096, yang berarti bahwa variabel independen Direksi Utama dan Kepemilikan Institusional hanya mampu menjelaskan 9,6% variasi dari variabel dependen Penghindaran Pajak. Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar - 0.076 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, model justru mengalami penurunan dalam kemampuannya menjelaskan variabel dependen. Nilai *R Square* yang sangat kecil ini mengindikasikan bahwa model regresi memiliki daya prediksi yang lemah, dan terdapat faktor lain di luar model yang lebih dominan dalam mempengaruhi Penghindaran Pajak.

4.1.7 Uji F Simultan

Tabel 4.8 Hasil Uji F Simultan

Model		F	Sig.
1	Regression	4,825	.010 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas hasil Uji F dalam analisis regresi menunjukkan bahwa model yang digunakan signifikan secara statistik. Hal ini terlihat dari nilai F-hitung sebesar 4.82 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.01, yang lebih kecil

dari batas kritis 0.05. Nilai ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen Kekuasaan Direksi Utama dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Karena nilai Sig. < 0.05, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditolak. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan dapat menjelaskan variasi dalam Penghindaran Pajak secara signifikan.

4.1.8 Uji t Parsial

Tabel 4. 9 Uji t Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,870	0,500		41,738	0,000
	Kekuasaan Direksi Utama	-0,166	0,282	-0,059	-0,590	0,557
	Kepemilikan Institusional	0,021	0,007	0,307	3,072	0,003

Sumber: Output IBM SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas hasil Uji *t* parsial dapat dilihat dari nilai signifikansi (Sig.) untuk Kekuasaan Direksi Utama sebesar 0.557 yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan (Sig.) terhadap variabel dependen. Sementara Kepemilikan Institusional sebesar 0.003 yang lebih kecil dari 0.05, dan nilai *t* menunjukkan angka positif yaitu 3.072 terhadap ETR. Jadi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel kekuasaan Direksi Utama terhadap

Penghindaran Pajak tidak dapat diterima sedangkan variabel kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak dapat diterima.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Kekuasaan Direksi Utama Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kekuasaan direksi utama tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.557 (> 0.05) dan nilai t negatif sebesar -0.590 yang berarti kekuasaan direksi utama negatif terhadap ETR dan positif terhadap penghindaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Karina & Jeksen, 2021) yang menyatakan bahwa kekuasaan direksi utama tidak mempengaruhi keputusan manajerial terkait penghindaran pajak. Dalam studi tersebut, meskipun direksi utama memiliki kewenangan strategis dalam perusahaan, praktik penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi dan tata kelola perusahaan daripada otoritas individual direksi utama.

Hasil uji penelitian dari perspektif teori *upper echelon*, yang mana teori ini menekankan pentingnya peran individu seperti direksi utama, namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa konteks organisasi dan eksternal bisa membatasi pengaruh tersebut. Dalam hal ini, keputusan terkait penghindaran pajak tampaknya lebih dipengaruhi oleh sistem tata kelola perusahaan dan regulasi eksternal ketimbang preferensi atau kekuasaan direksi utama. Ketika lingkungan regulasi ketat atau ketika perusahaan memiliki sistem tata kelola yang kuat, ruang gerak direksi utama dalam pengambilan keputusan seperti penghindaran pajak menjadi

terbatas. Hal ini memperkuat pandangan bahwa konteks eksternal dapat menetralkan efek dari karakteristik individual dalam teori *upper echelon*.

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$) dan nilai t positif sebesar 3.072 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Nuswantara, 2020) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional justru berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam konteks tersebut, keberadaan institusi sebagai pemegang saham dinilai mampu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat menekan manajemen untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Sementara itu, penelitian dari (Krisna, 2019) mengungkapkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak bersifat kondisional, tergantung pada efektivitas tata kelola perusahaan dan kualitas audit eksternal. Dalam perusahaan dengan pengawasan lemah, kepemilikan institusional tidak cukup kuat untuk mencegah penghindaran pajak, namun dalam lingkungan tata kelola yang baik, pengaruhnya menjadi signifikan. Perbedaan temuan antar penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak tidak bersifat linier dan mutlak, melainkan dipengaruhi oleh

faktor lain seperti tujuan kepemilikan institusi, karakteristik perusahaan, dan mekanisme tata kelola internal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berperan sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dalam teori ini, manajer memiliki kecenderungan untuk mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk penghindaran pajak yang dapat berisiko merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, kehadiran pemegang saham institusional yang memiliki proporsi kepemilikan yang signifikan dapat bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk membatasi perilaku manajemen. Jadi mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya kepemilikan institusional dapat meminimalkan konflik keagenan dan menurunkan praktik penghindaran pajak.